



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 18 Maret 2010

Halaman: 13

KPK

Pastikan Perkembangan Pencegahan Korupsi

JOGJA - Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyambangi Kota Jogja, kemarin (17/3). Penegak hukum *superbody* ini ingin memastikan perkembangan pencegahan tindak pidana korupsi. Sebab sejak 2006 silam, Kota Jogja menjadi daerah percontohan pencegahan tindak pidana korupsi.

"Jogja termasuk salah satu di antara enam kota yang dijadikan model tersebut. Selain Kota Jogja, ada Kabupaten Solok, Kabupaten Jember, Propinsi Gorontalo, Kabupaten Sragen, dan Kota Denpasar. Model di beberapa kota ini dijadikan *best practice* untuk disebar ke daerah lain di Indonesia," kata Kepala Tim Litbang KPK Luthfi Ganna Sukardi di balai kota, kemarin.

Ia menjelaskan, dalam kunjungan ini, timnya ingin memastikan kondisi beberapa layanan yang diberikan pemkot.

► Baca Pastikan... Hal 23

Jadi Dorongan bagi Pemkot

PASTIKAN...
 Sambungan dari hal 13

Seperti layanan kesehatan, sumber daya manusianya (PNS), perizinan, dan pendidikan. Empat bidang tersebut, kemarin ditinjau tim litbang KPK untuk diketahui sejauh mana peningkatan yang terjadi sejak tahun 2006 silam.

"Sekarang kami ingin kembali melihat apakah perkembangan peningkatan kesejahteraan atau peran masyarakat. Atau malah ada inovasi baru yang dikembangkan oleh Pemkot Jogja," terangnya.

Di beberapa daerah lain yang dijadikan ikon *best practice* ada daerah-daerah yang terlihat stagnan bahkan menurun. Mereka

melihat di Jogja ada beberapa pembaharuan sejak 2006 lalu, dan berharap masih menjadi ikon inovasi terbaru. Gebrakan-gebrakan inovatif di Jogja akan mereka ungkapkan lagi sebagai bahan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah lain.

Di Kota Jogja, berbagai layanan kepada masyarakat memang membuat peluang terjadinya tindak korupsi kian tipis. Mulai dari UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan), layanan satu atap, sampai program terbaru Unit Layanan Pengadaan (ULP). Bentuk program terakhir ini merupakan badan untuk pengadaan barang dan jasa di atas Rp100 juta.

ULP, kata Wali Kota Herry Zudianto, berfungsi mencegah potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. "Alhamdulillah, program-program tersebut dapat bekerja efektif dengan mendapatkan apresiasi dari KPK," kata Herry.

Herry menjelaskan, kedatangan Litbang KPK tersebut bakal menjadi dorongan bagi pihaknya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Herry berharap, dengan dibukanya saluran komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat, cita-cita *good governance* bisa terwujud.

"Mungkin, setelah Litbang KPK ini pulang ke Jakarta, kami akan melakukan inovasi lagi. Entah, nanti dari sektor apa, saat ini sedang dipikirkan," katanya. (eri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Humas dan Informasi			
3. Dinas Pendidikan			
4. Dinas Kesehatan			
5. Dinas Perizinan			
6.			
7. Inspektorat			

